

Kebebasan Manusia dalam Pandangan Budhisme

Supriyono Purwosaputro

Abstraks: Budhisme sebagai falsafah hidup memiliki sifat tidak memaksa, karenanya mampu menawarkan sejumlah kebebasan. Diskursus kebebasan mendapat tempat yang memadai dalam budhisme, oleh sebab itu kebebasan dalam konteks budhisme menjadi menarik untuk dijadikan satu tema sentral dalam kajian filsafat timur. Budhisme memberi penghargaan total terhadap kebebasan manusia dalam segala tindakan – ekspresi imannya. Melalui dan dengan kebebasannya itu, manusia akan dapat/mampu mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Kebebasan yang merupakan kodrat manusia, memiliki nilai implikatif bagi kehidupan manusia menuju proses pencerahan diri dan sekaligus pertanda keutuhan keluhuran individu pribadi manusia yang bersangkutan. Kebebasan universal-objektif nampak jelas dalam ajaran Budhisme dan akan menjadi hidup, jika ditempuh dengan delapan jalan kebenaran dalam Budhisme. Kebebasan manusia dalam pandangan Budhisme bersifat paradoks, pada tataran awal konseptualnya bersifat mutlak (absolute) tapi kemudian dalam tataran praktek harus mengingat kewajiban moral manusia, agar tidak mengakibatkan kesengsaraan bagi manusia lainnya.

Kata-kata kunci : kesengsaraan/ samsara, kebebasan, jalan kebenaran, pencerahan.

Filsafat Timur (termasuk di dalam Budhisme) hakikatnya merupakan falsafah hidup yang memiliki sifat tidak memaksa, dan oleh karenanya filsafat timur mampu menawarkan suatu falsafah hidup dengan seluruh kebebasan yang diberikan. Bedanya dengan filsafat barat, suatu ajaran dalam filsafat timur dilakukan secara individual (bukan model skolastik-

*Supriyono Purwosaputo adalah dosen Progd Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FPIPS IKIP PGRI Semarang*

klasikal) untuk mencapai kesempurnaan diri dalam menemukan sumber segala kesengsaraan.

Bagi Muji Sutrisno, filsafat timur lebih berupa sesuatu penawaran yang praktis mengenai kebahagiaan manusia. Orang tetap bebas menghadapi penawaran ini. (Mudji Sutrisno, *Kata Pengantar – dalam – “Jelajah Hakikat Pemikiran Timur”*, 1993). Ungkapan Mudji Sutrisno tersebut, menegaskan bahwa kebebasan manusia telah diberi tempat yang sangat memadai dalam alam pemikiran filsafat timur (termasuk di dalam pandangan Budhisme).

Ada kemungkinan karena “penawaran kebebasan pada diri manusia” itulah yang menyebabkan filsafat timur tidak tersingkirkan oleh kemajuan jaman, tetapi menjadi falsafah hidup bagi masyarakat modern (seperti pada masyarakat Jepang dan Hongkong). Di samping itu filsafat timur, juga tetap menjadi bahan kajian yang menarik, baik bagi masyarakat ilmiah barat maupun bagi masyarakat ilmiah timur. Hal lain yang memungkinkan filsafat timur tetap diminati adalah ciri-ciri yang melekat pada (menonjol) filsafat timur itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Mudji Sutrisno.

1. Filsafat timur memiliki ciri sentral – religiusitas yang mendalam, artinya filsafat selalu dikaitkan dengan persoalan keselamatan manusia. Keselamatan itu dicapai dengan penguasaan diri dan akhirnya mencapai penemuan diri.
2. Ciri kedua, filsafat timur tidak membagi-bagi mana yang rasional dan yang irasional, tetapi menekankan segi praktis, dalam arti bahwa filsafat senantiasa dikaitkan dengan tujuan hidup manusia: mengatasi derita dan mengatasi duka.
3. Ciri ketiga, filsafat timur tidak berprestasi menjawab persoalan-persoalan teknologis yang ada dalam masyarakat modern. (Adaptasi dari Mudji Sutrisno, *Ibid*).

Melihat ciri sentral filsafat timur di atas, maka dirasakan bagi penganutnya filsafat timur itu telah memberikan “kesejukan religius” dan bahkan dirasakan pula telah menjauhkan/menghindarkan manusia dari kegersangan maupun kehampaan hidup. Filsafat timur juga dianggap mampu membebaskan manusia dari penderitaan atau kesengsaraan hidup. Ciri yang demikian itu juga sangat menonjol dalam Budhisme, yang dianggap mampu membawa pada pencerahan hidup manusia. Dari ciri kedua dalam filsafat timur itu merupakan sistem filsafat awal bahwa filsafat timur itu merupakan sistem filsafat timur yang tidak sederhana, melainkan cukup

rumit (kompleks). Sedangkan dari ciri ketiga, seakan diperoleh kesan bahwa filsafat timur itu tradisional dan ketinggalan jaman.

Kelahiran Budhisme sebagai reaksi terhadap ritualisme yang dianggap terlalu dangkal dan juga reaksi terhadap Upanisad yang dianggap penuh dengan refleksi filosofis yang berbelit-belit (rumit), sehingga bersifat positivitas dan sebenarnya menyandarkan diri pada dua proposisi. Pertama, dalam alam pikiran dan kepercayaan akan adanya kelahiran kembali yang tak terbatas jumlahnya, menunjukkan diakui akan berlakunya konsep karma ("Karma") – berisi hukum sebab-akibat yang menguasai eksistensitas manusia, serta adanya konteks pemahaman yang histories siklis. Kedua, pengalaman penerangan yang dialami oleh Sidharta Gutama dalam meditasinya, saat ia "disadarkan" akan empat kebenaran. (Andre Bareau, seperti yang dikutip oleh Suwandi Sandiwan Brata, dalam "Jelajah Hakikat Pemikiran Timur, 1993). Lahirnya Budhisme dianggap akan mampu membawa kebebasan manusia dari ikatan-ikatan ritualisme yang kurang bermakna, juga membebaskan manusia yang tak mengenal kasta dari ikatan kasta untuk mendapatkan pencerahan rohani.

Berangkat dari pokok-pokok uraian di atas, dalam tulisan yang relative singkat ini akan lebih difokuskan pada persoalan kebebasan manusia, di sini diasumsikan sebagai kebebasan yang obyektif-universal. Dalam kaitannya dengan masalah kebebasan tersebut, Franklin Empat Kebebasan yang disampaikan pada Kongres tahun 1941. Kebebasan dasar manusia dimaksud, yaitu:

Pertama, kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat di mana saja di dunia.

Kedua, kebebasan setiap pribadi untuk menyembah Tuhannya dengan cara masing-masing, di mana saja di dunia.

Ketiga, kebebasan dari kekurangan, yang berarti saling pengertian dalam bidang ekonomi, adanya jaminan negara bagi hidup yang sehat dan damai untuk penduduknya, di mana saja di dunia.

Keempat, kebebasan dari ketakutan, yang berarti persenjataan harus dikurangi sedemikian rupa sehingga di mana saja tidak ada negara yang ada dalam posisi dapat menyerang negara tetangganya. (Dalam To Thi Anh, 1985).

Dalam kaitannya dengan hal di atas, maka tulisan ini akan mencoba menelusuri masalah: "apakah dalam Budhisme terkandung konsep-konsep

kebebasan manusia?" Atau "Unsur-unsur kebebasan manusia yang seperti apa yang terkandung dalam Buddhisme itu?"

PEMBAHASAN

Kebebasan Manusia

Kebebasan merupakan tanda yang memberi ciri khas pada kodrat manusia. Seseorang akan menjadi pribadi yang berarti jika ia menjadi mampu memilih yang dikehendaki dan yang ingin dikerjakannya. Kebebasan disadari oleh manusia sebagai kekuatan yang secara kualitatif berbeda dari mekanisme biologis. Secara kodrati kebebasan dianggap sebagai hak dari setiap orang yang lahir di dunia. Bahwa dapat pula dikatakan bahwa manusia belum sungguh-sungguh menjadi manusia yang bermartabat, jika tanpa kebebasan. (Adaptasi dari Y.I. Iswarahadi dalam BASIS, Edisi Juni 1988-XXXVII-6 hal. 202).

Dalam sejarah umat manusia pada pergerakan revolusioner telah tercatat kegigihan manusia untuk memperjuangkan kebebasan. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan merupakan harta pribadi yang masih dan akan terus diperjuangkan oleh umat manusia itu sendiri. (Y.I. Iswarahadi, *Ibid*, 1988).

Di Indonesia, seringkali dengan alasan budaya etika ketimuran, paham Demokrasi Pancasila dan stabilitas nasional – kebebasan pribadi individu menjadi dibatasi. Namun demikian perlu diingat pula bahwa peradaban manusia itu berada dalam konteks kesadaran kehidupan kolektif bermasyarakat. Hal ini memberikan gambaran awal bahwa tanpa hidup bermasyarakat, maka realitas kebebasan sulit muncul dalam kehidupan individu.

Kebebasan manusia itu memiliki makna positif, maksudnya bahwa dengan memiliki dan melalui kebebasan itu manusia dapat memperjuangkan dan memperlihatkan eksistensinya yang berbeda dengan keberadaannya manusia lainnya.

Mudji Sutrisno dalam pengantarnya bahwa buku "Budaya dan Kebebasan" (John Dewey) menyatakan bahwa: "menjernihkan dan memahami konsep kebebasan merupakan sebuah proses panjang pergulatan nilai dengan konflik-konflik kesadaran intelektualnya serta sebagai problematika filsafat (problematika mendasar umat manusia)". Hal ini

menegaskan bahwa kebebasan manusia bukan hanya menampakkan masalah sosial politik saja, tetapi juga merupakan masalah mendasar bagi umat manusia dan oleh karenanya perlu dikaji secara filsafat (dengan pendekatan ilmu filsafat).

Kebebasan yang melekat pada manusia itu patut dipertanyakan mengenai sifatnya mutlak ataukah kontekstual? Apabila kebebasan itu bersifat mutlak, maka perlu dicari dasar-dasar filsafatnya dan logikanya agar kemutlakan kebebasan manusia itu menjadi lebih jelas dan ada pijakan dasar filsafatnya. Selanjutnya apabila kebebasan manusia itu bersifat kontekstual. John Dewey mengajukan beberapa pertanyaan mendasar berkenaan dengan kebebasan manusia, yang antara lain: apakah kebebasan merupakan sesuatu yang telah ada dalam watak manusia, ataukah merupakan hasil dari suatu situasi tertentu? Apakah kebebasan itu merupakan tujuan ataukah sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan? Apakah kebebasan manusia itu harus dipertanggungjawabkan dengan demikian beratnya, sehingga kebanyakan manusia menjadi takut untuk mempergunakannya? Pertanyaan-pertanyaan awal di atas, sedikit memberi gambaran betapa rumitnya (kompleks) masalah kebebasan manusia itu.

Konsep kebebasan manusia menurut Abdul Kadir Besar, adalah bahwa kebebasan manusia itu berwujud kebebasan yang bersituasi atau disingkat kebebasan bersituasi, artinya kebebasan manusia itu sebagai sesuatu yang eksis, berada dalam kondisi saling tergantung dengan situasi. Di samping itu kebebasan manusia juga berada dalam konteks "kebebasan dan orang lain". Kebebasan niscaya menunjuk pada adanya orang lain atau hal lain yang berada di luar diri manusia itu. Bila kebebasan diartikan "bebas untuk...", maka secara logik menunjuk pada adanya orang lain, maksudnya bahwa siapapun orang lain dimaksud tidak memiliki hak untuk mencegah atau menghalangi, apabila melarang seseorang untuk berbuat apapun sesuai yang dikehendaknya. Kebebasan manusia yang demikian itu, baik dalam idea maupun dalam realita tidaklah logik dan tidak mungkin ada. Hal ini terutama disebabkan oleh keberadaan manusia yang sangat tergantung pada lingkungan keberadaannya. Lebih lanjut bila kebebasan diartikan "bebas dari..." secara logik juga menunjuk pada adanya orang lain atau pihak lain yang akan "memberikan bebas dari...". Kebebasan yang demikianpun secara idea dan secara realitas tidak mungkin terwujud. (Lihat: Abdul Kadir Besar, dalam makalahnya "Cita Negara Persatuan", 1996, hal. 34).

Abdul Kadir Besar, lebih lanjut menyatakan bahwa perwujudan kebebasan itu terbawa oleh hakekatnya sendiri, yaitu relasi. Dengan demikian hanya terdapat satu cara untuk mewujudkan kebebasan manusia, yaitu melalui interaksi saling memberi antara manusia yang saling bertautan. Integrasi dari segenap hasil terlaksananya kewajiban memberi dari semua orang yang bertautan, oleh satu orang itu dipersepsi dan dihayati sebagai hak kebebasannya untuk berbuat sesuatu. Dengan kenyataan yang demikian itu, maka kondisi-relasional merupakan "arena kebebasan" bagi yang satu oleh yang lain. (Makna kebebasan bersituasi). Pandangan mengenai kebebasan manusia yang agak berbeda, dikemukakan oleh Y.I. Iswarahadi dalam BASIS edisi: Juni 1988, yaitu sebagai berikut: "Kebebasan itu dapat dimaknai positif, yaitu dengan menekankan kekuatan untuk menjadi". Pernyataan kebebasan tersebut dapat ditafsirkan bahwa dengan memiliki dan melalui kebebasan itu, manusia dapat memperjuangkan dan memperlihatkan eksistensinya yang berbeda dengan keberadaannya dari manusia yang lain.

Konsep kebebasan masih menurut Y.I. Iswarahadi, merupakan "ketidaktergantungan dan penentuan diri". Kebebasan manusia tidak dipertentangkan dengan determinisme.

Konsep kebebasan tersebut, kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebebasan yang melekat pada diri manusia merupakan keleluasaan yang dimiliki untuk tidak tergantung pada orang lain atau hal lain dalam menentukan kehendak dan melaksanakan kehendaknya.
2. Dalam kebebasan manusia itu terdapat situasi dan kondisi yang leluasa untuk melakukan "penentuan diri" yang berarti manusia itu memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan kehendak serta aktualisasi dirinya tanpa dikendalikan oleh pihak lain.

Konsep kebebasan tersebut nampaknya kontradiktif dengan pandangan Nico Syukur Dister OFM, yang memberi gambaran kebebasan bahwa kebebasan manusia itu selalu tercampur dengan ketidakbebasan. Maka manusia tidak pernah seratus persen bebas. Situasi dan kondisi manusia, bukan hanya membatasi/menghalangi kebebasan, melainkan juga menjadi faktor yang memungkinkan/memunculkan kebebasan manusia itu sendiri. (Nico Syukur O.F.M., 1996).

Pandangan senada dengan Y.I. Iswarahadi, dikemukakan oleh Filfut Perancis Taqqeville, yaitu: Menurut pengertian modern, pengertian demokratis, dan saya kira makna sejati dari kebebasan adalah setiap orang,

karena dianggap telah menerima dari alam kearifan yang diperlukan untuk bertingkah laku, pada saat lahir telah membawa hak yang sama dan tak tertiadakan untuk hidup tanpa tergantung pada semuanya, mengurus hal yang menyangkut dirinya, dan menyelesaikan masalah sesuai dengan takdirnya". (Raymond Aron, 1993).

Dalam definisi tersebut ditunjukkan mengenai beberapa hal yang terdapat dalam kebebasan itu.

1. Kebebasan manusia berada dalam konteks suasana kondisi demokratis atau terwujud dalam kehidupan antar sesama manusia yang demokratis, tidak dalam kehidupan antar sesama manusia yang diliputi suasana saling memusuhi dan bahkan saling menghilangkan.
2. kebebasan manusia itu bersifat "kodratiah" yang dianugerahkan oleh Tuhan pada tiap-tiap manusia, maka dalam kearifan kehidupan manusia tidak dibenarkan adanya suasana untuk mengurangi, menghalangi bahkan menghilangkan kebebasan.
3. kebebasan manusia memberi keleluasaan hidup tanpa bergantung (dalam arti absolut) pada sesamanya dan memberi keleluasaan pula pada manusia untuk mengurus dan menyelesaikan masalah berbagai hal-ikhwal yang menyangkut pribadi manusia itu sendiri yang sesuai dengan takdir atau kemampuan manusiawinya.

Seorang manusia dapat dikatakan bebas atau sebaliknya tidak bebas itu bisa dilihat dari indikator kemampuan berpikir dan membuat putusan-putusan, yang melekat pada pribadi manusia itu sendiri (termasuk di dalamnya kemampuan untuk melaksanakannya). Dalam konteks ini, manusia berarti pula manusiayang mampu lepas dari berbagai unsure paksaan dan sebaliknya manusia yang tidak bebas itu manusiayang dalam alam pemikirannya dan tindakannya disuasanai oleh sejumlah unsur paksaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan F.A. Hayek mengenai kebebasan. Kebebasan menurut F.A. Hayek, hanyalah ketiadaan paksaan (coercion).

Pada gilirannya paksaan muncul apabila tindakan seseorang tundukpada kehendak orang lain yang berkuasa, bahkan lahir dari kesadaran sendiri- melainkan dari rencana orang lain. Lebih lanjut paksaan berarti ancaman penindasan dan sekaligus dengan itu menentukan tingkah laku tertentu. Esensi paksaan adalah ancaman menimpakan hukuman pada orang lain, jika ia tidak tunduk pada kehendak kita. Orang yang terkena paksaan

akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan kecerdasannya memilih sarana dan tujuannya. Ia menjadi alat seseorang yang memaksakan kehendaknya kepadanya. Dalam kaitan dengan supremasi hukum, maka orang yang tunduk pada hukum tidak berarti dia menjadi orang yang tidak bebas. Hal ini disebabkan kepatuhan (tunduk) kepada undang-undang atau peraturan umum dan abstrak yang dirumuskan tanpa acuan kepada suatu penerapan yang mungkin menjurus pada diri kita sendiri (subjektifitas), hal yang demikian tidak berarti kita tunduk pada kehendak orang lain, karena aturan hukum itu sifatnya objektif (hasil kesepakatan kolektif yang luas), dan arena itu kita tetap menjadi manusia bebas dalam sistem masyarakat bebas. (Lihat : Raymond Aron, 1933, hal. 81-83).

Kebebasan secara hakiki berarti pula komitmen yang disertai kesadaran tanggung jawab. (Soerjanto Poespowardojo, 1944, hal.74). pandangan senada dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno, yang membedakan adanya kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial. Kebebasan sosial merupakan kebebasan yang diterima oleh manusia dari lapangan pergaulannya di masyarakat. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebebasan yang terbatas, karena kebebasan itu diterima dari lingkungan pergaulan masyarakat manusia yang didalamnya masing-masing manusia akan mendapat kebebasan pula. (Batasan rekayasa peneliti). Kebebasan eksistensial pada hakekatnya berdiri dalam kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Sifatnya positif, artinya kebebasan itu tidak menekankan segi bebas dari apa, melainkan bebas untuk apa. Kita sanggup untuk menentukan tindakan kita sendiri. Kebebasan itu mendapat wujud yang positif dalam tindakan kita yang disengaja. (Frans Magnis Susena, 1987, hal. 22).

Dalam kaitanya konsep diatas, secara implisit tersirat adanya tanggung jawab dari masing-masing kebebasan. Kebebasan sosial akan membawa konsekuensi adanya rasa tanggung jawab dari masing-masing dan penanggung dari kebebasan itu kepada masyarakat. Sedangkan kebebasan eksistensial menuntut adanya rasa tanggung jawab dari pribadi manusia dalam hal menggunakan kebebasan.

Aktualisasi kebebasan manusia dalam idea maupun perwujudanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Y.I. Iswarahadi mengajukan adanya faktor dari luar dan faktor dari dalam diri manusia. (Basis, Edisi Juni 1988, hal.206). Faktor kondisi dari luar, meliputi : faktor material, faktor sosial,

faktor budaya, faktor politik, dan sebagainya.

Faktor kondisi dari dalam, meliputi : faktor psikologis-emosional, faktor

1. Kebiasaan, faktor inteligensi, dan faktor integritas.

Untuk kepentingan analisis sederhana dalam tulisan ini, dan mengingat pula akan rumitnya konsep kebebasan manusia seperti yang telah diuraikan di atas, maka analisis terhadap kebebasan manusia dalam pandangan Budhisme akan lebih diarahkan pada hal-hal berikut ini.

2. Kebebasan obyektif-uniferal, seperti yang disodorkan oleh Franklin D. Roosevelt dalam deklarasi empat kebebasan, yaitu kebebasan dasar manusia yang meliputi :
 - a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat.
 - b. Kebebasan setiap pribadi untuk menyembah Tuhanya dengan caranya masing-masing.
 - c. Kebebasan dari kekurangan, yang berarti saling pengertian dalam bidang ekonomi, adanya jaminan negara bagi hidupyang sehat dan damai untuk penduduknya.
 - d. Kebebasan dari ketakutan. (Lihat kembali dalam : To Thi Anh, 1985).
3. Kebebasan manusia seperti yang didefinisikan oleh Toqueville, yaitu bahwa kebebasan manusia itu merupakan kodrat dalam alam kearifan manusia untuk bertingkah laku, kebebasan manusia memberikan keleluasaan hidup sesuai dengan kemampuan manusiawinya, kebebasan manusia itu berada dalam konteks suasana kehidupan yang demokratis.

Budhisme

Budhisme adalah suatu aliran spiritual yang bertujuan mencapai kesempurnaan, bagi penganutnya, Budhisme merupakan agama yang pertama kali menjadi agama Internasional. (Robert E. Hume, seperti oleh Wagiyo, 1985,h.1).

Budhisme memuat ajaran pokok yang terdiri dari empat kebenaran utama ("aryasatya") dan delapan jalan luhur.

Empat kebenaran utama dimaksud, adalah :

2. Hidup adalah menderita ("dukkha")
3. Penderitaan/ kesengsaraan ituada sebabnya ("samudaya")
4. Sengsara bisa diatasi dengan melenyapkan keinginan ("nirodha")

1. Jalan mengatasi sebab-sebab derita itu terdiri dari delapan jalan ("marga"). Jalan kebenaran menuju pelenyapan/ pelepasan dari kesengsaran.

Ke delapan jalan ("marga") kebenaran yang diajarkan oleh Sidharta Gautama, adalah :

1. Melihat/ memandang dengan benar
2. Mengingini dengan benar
3. Berbicara dengan benar
4. Bertingkah laku (bertindak) dengan benar
5. Memakai sarana yang benar untuk hidup
6. Menyimpan/ mewarisi dengan benar
7. Berfikir dengan lurus
8. Bermeditasi secara benar

Kedelapan jalan kebenaran tersebut merupakan tuntunan (bimbingan) bagi manusia untuk dapat lepas atau bebas dari hidup yang sengsara. Secara singkat kedelapan jalan kebenaran atau delapan jalan tengah itu, dijabarkan oleh Wagiyono sebagai berikut :

1. Melihat atau iman yang benar, dalam arti bahwa manusia membutuhkan pembebasan dari penderitaan. Untuk menggapai maksud tersebut manusia harus percaya dan mempercayakan hal itu kepada "Triratna" (Budha, Dharma dan Sangha).
2. Mengingini (niat) yang benar, artinya tanpa berkat niat yang benar, maka manusia tidak akan mampu membuat dan mengatur usahanya secara sungguh-sungguh.
3. Berbicara (kata-kata yang benar), artinya bahwa manusia harus dapat menjaga atau mengatur lidahnya, dapat dipercaya, ramah tamah, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, rendah hati dan baik hati.
4. Bertingkah laku (berbuat) yang benar, artinya manusia dalam tingkah lakunya harus didasarkan pada maksud yang suci dan manusiawi.
5. Hidup yang benar, artinya bahwa manusia itu harus senantiasa mempunyai tujuan yang serasi, selaras, seimbang dan simultan antara lahir dan batin.
6. Mewaris (usaha) yang benar, artinya bahwa manusia harus disiplin, menentang segala bentuk kejahatan dan mengutamakan kebajikan.
7. Berpikir yang benar, artinya bahwa kesadaran diri merupakan unsure yang penting dalam mencapai kelepasan, karena manusia sedang berada

pada jalan kelepasan.

8. Bermeditasi (Samadhi) yang benar, artinya bahwa manusia dapat mengenal diri sendiri dengan kebenaran lewat meditasi /Samadhi, dengan cara demikian kelepasan akan dapat tercapai. (Wagiyo, 1985).

Disamping memberikan ajaran-ajaran pokok dan menawarkan delapan jalan kebenaran menuju kelepasan manusia dari penderitaan /sengsara, Budhisme ternyata juga menempatkan manusia sebagai titik pusat persoalan.

Budhisme mencari reformasi dan menolak autoritas yang ditentukan oleh agama-agama yang muncul sebelum budha dan mengajarkan suatu moralitas etis yang berdiri sendiri. Autoritas dari Brahmanisme Jainisme dan agama-agama yang lainya ditolak. (Marcos de Oliveira, dalam Mujdi Sutrisno, ed. 1993).

Dari pernyataan diatas, diperoleh keterangan bahwa untuk dapat sampai pada pengelepasan (pembebasan) diri dari sengsara, manusia harus mampu melakukannya sendiri melalui delapan jalan kebenaran dan tidak tergantung pada suatu kekuatan apapun yang bersifat transcendental. Hal ini yang mungkin menjadi titik awal dari kebebasan manusia dalam pandangan Budhisme. Eksistensi manusia dalam pandangan Budhisme selalu diliputi oleh situasi penderitaan atau kesengsaraan. Kegembiraan ataupun suka cita, bahkan diasumsikan akan mengakibatkan kesedihan/ kesengsaraan yang lebih berat pada diri manusia itu. Secara mendasar situasi eksistensi manusia dikelilingi oleh lingkaran samsara atau kesengsaraan yang sulit (bahkan tidak bisa) diketahui sebab musababnya. Oleh ajaran Budha, lingkaran kesengsaraan itu hendak diputus dengan jalan mencapai pencerahan hidup dan sekaligus mengakhiri eksistensi manusia dalam penderitaan.

Perbedaan mendasar antara ajaran Budha dengan ajaran wahyu, adalah bahwa kebenaran, pencerahan, atau keselamatan dapat dicapai dengan usaha manusia itu sendiri, tanpa pertolongan orang lain. Budha tidak sama dengan agama wahyu yang selalu mengutamakan keesaan Tuhan yang turut dalam keselamatan manusia. (Juliman J. Saragi, 1993, h. 117).

Dalam Budhisme ditemui adanya dua aliran besar, yaitu : "Hinayana" atau disebut "Therafada" yang berarti jalan dari sesepuh, dan aliran "Mahayana". Dalam aliran Hinayana lebih menekankan pada ketaatan kehidupan moral Budha dan tingkah lakunya dalam rangka mencapai

kebenaran. Aliran Mahayana lebih menekankan dalam mencapai kebenaran dalam upaya yang lebih intuitif dari realisasi diri yang telah dimiliki, dengan menunda atau menangguhkan yang diletakkan dalam kepentingan membantu orang lain. Kebebasan manusia barangkali lebih banyak ditemui dalam aliran Mahayana.

Analisis Kebebasan Manusia

Analisis terhadap kebebasan manusia dalam tulisan ini akan dilakukan berdasarkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Budhisme. Sebelum dilakukan analisis secara rinci, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pandangan umum mengenai kebebasan manusia itu dalam Budhisme. Hal ini dilakukan untuk membantu perolehan pemahaman yang lebih baik.

Titik awal kebebasan manusia dalam Budhisme adalah terletak pada ciri khas ajaran budhayang menonjol, yaitu penghargaan total terhadap kebebasan manusia dalam tindakanya yang paling intim (ekspresi imanya). Dalam Budhisme tidak dikenal adanya kekuatan dari atas yang memaksakan seperangkat dogma dan aturan ritual. Budha justru melarang penganutnya mengikuti sesuatu hanya karena diajarkan begitu, (To Thi Anh, 1985, h. 30).

Manusia dalam Budhisme diberi kebebasan penuh untuk mengekspresikan perilaku imaniahnya, agar ia dapat mencapai pencerahan secara mandiri. Penggunaan kebebasan pada diri manusia itu nantinya justru menjadi pertanda keluhuran diri pada manusia tersebut. Keluhuran budi dan kesucian batin tidak dibagi batasi oleh tubuh jasmani manusia yang serba kekurangan. Penyepurnaan batin menghendaki kebebasan berpikir. Keluruhan kebebasan manusia terletak pada kemampuan kebebasan berpikirnya, bukan pada keterbelengguanya dalam berfikir.

Moralitas Budhisme mendasarkan kebebasan manusia sebagai tuan atas dirinya, jika manusia dikuasai oleh suatu kekuatan diluar dirinya, jika ia diatur atau dipaksa untuk menerima nasib atau keadaanya, manusia kan tidak memiliki tangunh jawab atas keberadaanya. Hanya dengan kehendak bebasnya sendiri manusia dapat mempertanggungjawabkan segala pikiran, sikap, dan tindakanya. Tanggung jawab moral dan pemikiran dalam agama Budha berpangkal pada kemerdekaan indifidu. (K. Wijaya Mukti, 1993, h. 51).

Uraian diatas menjelaskan bahwa kebebasan manusia itu menurut Budhisme, harus diletakkan dalam kerangka tanggung jawab moral,

seseorang hanya akan dapat menunjukkan tanggung jawab etis (moral), bila pada orang tersebut melekat adanya kebebasan. Hal ini mengandung arti bahwa kebebasan manusia dalam Budhisme bersifat kontekstual, dalam situasi tanggung jawab moral secara penuh. Kriteria tanggung jawab moral disini, sudah barang tentu berdasarkan pada ajaran pokok Budha (termasuk didalamnya delapan jalan jalan kebenaran).

Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang bebas. Menurut pandangan Budha, semua orang mempunyai derajat yang sama dan tidak ditakdirkan untuk diperbudak atau memperbudak orang lain. Tanpa pengakuan atas kebebasan ini, tidak ada agama Budha yang bakal mengajarkan kebebasan kebebasan berpikir. Tanpa kemerdekaan, sulit dibayangkan bagaimana orang dapat menganut agama Budha dengan benar. (K. Wijaya Mukti, 1933, h. 54).

Sekali lagi pernyataan Wijaya Mukti tersebut, menegaskan pentingnya kebebasan manusia dalam praktek agama Budha. Lebih lanjut ditegaskan bahwa : manusia merdeka seharusnya tidak dijajah oleh belenggu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Terdapat sejumlah belenggu (*samyojana*) yang menjauhkan manusia dari kebahagiaan dan membuatnya mengulangi kehidupan yang penuh penderitaan. Belenggu tersebut, misalnya ke-aku-an yang dipandang secara berlebihan, hawa napsu, kebencian/ niat jahat, kesombongan, kekacauan pikiran dan kebohongan, serta kekurangan keyakinan pada dharma atau hukum kebenaran.

Kebebasan obyektif- unifersal (meliputi: kebebasan berbicara/berpikir, kebebasan dari kekurangan, kebebasan menyembah tuhan, dan kebebasan dari ketakutan) nampak dijamin dalam Budhisme, asalkan semuanya ditempuh melalui delapan jalan kebenaran.

Kebebasan manusia, seperti yang diajukan oleh Toqqueville (kebebasan kodratilah manusia, keleluasaan manusia, keleluasaan hidup sesuai dengan kemampuan manusiawinya yang berada dalam konteks suasana demokratis) juga diakui oleh ajaran Budhisme.

Kebebasan manusia dalam pandangan Budhisme, harus dipahami dalam konteks jalan kebenaran menuju pengelepasan eksistensi manusia yang diselimuti oleh penderitaan. Kebebasan disini dipakai manusia dalam rangka melepaskan diri dari segala bentuk kesengsaraan/ penderitaan.

Kebebasan manusia dalam pandangan Budhisme, pada awalnya bersifat mutlak (absolute), tetapi kemudian dalam prakteknya harus selalu mengingat kewajiban moral manusia yang selalu dituntut tanggung jawab moralitasnya. Hal ini penting dipahami oleh semua manusia, agar dalam mewujudkan kebebasannya itu tidak menimbulkan penderitaan/kesengsaraan pada manusia lainya. Sebab, kalau seseorang itu menggunakan kebebasannya telah merugikan pihak lain, berarti orang tersebut tidak memperoleh jalan kebenaran- sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Budha.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan masalah yang telah diuraikan dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Budhisme memberi penghargaan total terhadap kebebasan manusia dalam segala tindakan- ekspresi imanya. Dengan kebebasan manusia itu, manusia akan dapat mempertanggung jawabkan segala tindakanya.
2. Kebebasan manusia yang merupakan kodratnya itu dipakai manusia dalam rangka mencapai pencerahan secara mandiri. Kebebasan untuk pemecahan diri itu, akan menjadi pertanda bagi keseluruhan diri pribadi manusia tersebut.
3. Kebebasan objektif-universal, terlihat dijamin dalam ajaran Budhisme, asalkan kesemuanya itu ditempuh dengan delapan jalan kebenaran yang telah diajarkan oleh Budha.

Kebebasan manusia diartikan sebagai sarana untuk melepaskan diri dari segala bentuk kesengsaraan/ penderitaan.

4. Kebebasan manusia dalam pandangan Budhisme, pada awal tataran konseptualnya bersifat mutlak (absolute), tetapi kemudian dalam praktek harus mengingat kewajiban moralnya manusia yang selalu dituntut tanggungjawab moralnya. Kebebasan dalam konteks tanggung jawab moral ini dirasa sangat penting, agar dalam mewujudkan kebebasannya itu seseorang tidak mengakibatkan kesengsaraan bagi manusia lainya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diajukan beberapa saran atau rekomendasi sebagai bahan renungan atau bahan kajian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian pada Budhisme. Beberapa saran yang

dianjurkan, antara lain :

1. Manusia harus selalu mengingat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan itu memerlukan batas-batas normatif.
2. Penggunaan kebebasan yang dijamin dalam Budhisme, harus selalu diletakkan dalam kerangka jalan kebenaran menuju pengelepasan dari penderitaan manusia.
3. Agar manusia menjadi luhur kepribadianya dalam kehidupan bersama dalam lingkungan masyarakat, maka ia dituntut dapat menggunakan hak dan kebebasannya dalam konteks tanggungjawab moral, sehingga tidak mengakibatkan manusia lainnya menjadi menderita atau sengsara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anh, To Thi, *Nilai Budaya Timur Dan Barat Konflik atau Harmoni*, 1985, Gramedia, Jakarta.
- Aron, Raymond, *Kebebasan dan Martabat Manusia*, 1993, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Basis, edisi : Juni 1984- XXXIII-6
- Basis, edisi : Nopember 1987- XXXVI-II
- Besar, Abdul Kadir, *Cinta Negara Persatuan*, Makalah dalam intension Dosen Dosen Filsafat Pancasila, 1996, UGM, Yogyakarta.
- Dewey, John, *Budaya dan Kebebasan*, 1998, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Dister, Nico Syukur, *Filsafat Kebebasan*, 1996, Kanisius, Yogyakarta.
- Frondisi, Resieri, *What is Value, An Introduction to Axiology*, 1887, Established, Lasalle, Illionis.
- Koesbyantoro, JA. Dhanu & Firman Adi Yuwono, *Pencerahan Suatu Pencarian Makna Hidup Dalam Zen Budhisme*, 1997, Kanisius Yogyakarta.
- Lasiyo, *Kapita Selekta Filsafat Asia*, 1995, PPS,-UGM, Yogyakarta.
- Lasiyo, *Unsur-Unsur Filsafat Manusia yang terkandung Dalam Pemikiran Filsafat Cina dan Manfaat bagi Pengembangan Sumber Daya Insan*, 1999, *Jurnal Filsafat – Juni 1999*, Yayasan Pembina Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Lowy, Michael, *Teologi Pembebasan*, 1999, Inssist Pers, Yogyakarta.
- Mukti, Wijaya, *Di atas Kekuasaan dan Kekayaan*, 1993, Yayasan Dharma Pembangunan, Jakarta.
- Said, Muh, *Etik Masyarakat Indonesia*, 1980. Pradnya Paramita, Jakarta.

- Siagian, Seno Harbangan, *Agama-Agam Di Indonesia*, 1993, Satya Wacana, Semarang.
- Sutrisno, FX. Mujdi, Ed., *Budhisme Pengaruhnya Dalam Abad Modern*, 1993, Kanisius, Yogyakarta.
- Tim Redaksi Driyarkara, *Jelajah Hakikat Pemikiran Timur*, 1993, Gramedia Jakarta.
- Wagiyo, *Pengantar Memahami Pemikiran Dalam Budhisme*, 1985, Fakultas Filsafat, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.